

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Fundamentalisme Islam”

WACANA

Kusmana

Gerakan Sosial dan Anarkisme: Sebuah Analisis Teoritis

Chaider S. Bamualim

Fundamentalisme Islam, Krisis Modernitas dan Rekonstruksi Identitas

Jajang Jahroni

Islamic Fundamentalism in Contemporary Indonesia

Noryamin Aini

Ridda (Apostasy) and the Ambiguity of Islamic Legal Discourses

Muhamad Ali

Agama Sebagai Faktor Konflik dan Integrasi

ANALISIS BUKU

Ismatu Ropi

Melacak Akar Perang Suci: Perkembangan Ide *Jihād* dalam Tradisi Islam

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. IV, No. 1, 2002

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Said Agil H. Al-Munawwar
Amsal Bakhtiar

Pemimpin Redaksi

Kusmana

Anggota Redaksi

Din Wahid
Bustamin

Sekretariat

Burhanuddin

Penerbit

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Articles

- 1-18 **Gerakan Sosial dan Anarkisme: Sebuah Analisis Teoritis**
Kusmana
- 19-38 **Fundamentalisme Islam, Krisis Modernitas dan Rekonstruksi Identitas**
Chaider S. Bamualim
- 39-54 **Islamic Fundamentalism in Contemporary Indonesia**
Jajang Jahroni
- 55-76 ***Ridda* (Apostasy) and the Ambiguity of Islamic Legal Discourses**
Noryamin Aini
- 77-90 **Agama Sebagai Faktor Konflik dan Integrasi**
Muhamad Ali

Book Review

- 91-102 **Melacak Akar Perang Suci: Perkembangan Ide *Jihād* dalam Tradisi Islam**
Ismatu Ropi

Document

- 103-118 **Agama dan Tantangan Sains Modern**
Amsal Bakhtiar
- 119-132 **Humanisme Freudian dan Pandangannya tentang Agama**
Mudji Sutrisno
- 133-142 **Pemikiran Politik Ahmad Khan**
Masykur Hakim

FUNDAMENTALISME ISLAM

TEMA yang diangkat oleh redaksi *Refleksi* untuk edisi kali ini adalah *fundamentalisme Islam*. Pengusungan tema ini diilhami oleh munculnya beberapa organisasi/ gerakan Islam yang kurang lebih bernuansa radikal di Indonesia, terutama setelah tumbangannya rezim Orde Baru, ditambah dengan semaraknya berbagai aksi yang dilakukan oleh organisasi/ gerakan tersebut di atas, tentunya dengan tidak mengabaikan aspek historis dari kemunculan dan perkembangan gerakan sosial keagamaan masyarakat Islam secara umum.

Ada enam artikel yang berkaitan dengan tema ini yang masuk ke meja redaksi, lima artikel dikategorikan ke dalam rubrik wacana dan satu artikel ke dalam rubrik analisis buku. Pertama, artikel Kusmana *Gerakan Sosial dan Anarkisme: Sebuah Analisis Teoritis*. Tulisan ini sesungguhnya tidak berkaitan secara langsung dengan tema edisi *Refleksi* kali ini, tapi substansi bahasannya —walau merupakan penjabaran awal atau catatan *preliminary*— memberi kepada pembaca informasi teoritis fenomena gerakan sosial di mana fundamentalisme agama itu sendiri merupakan salah satu fenomena gerakan sosial. Penulis mencoba menjelaskan hubungan gerakan sosial dan anarkisme dalam wacana gerakan sosial, demokrasi dan gerakan sosial keagamaan. Dia menggali kemungkinan model ekspresi hubungan keduanya melalui penjelasan pengertian, ruang lingkup, sejarah dan inferensi teoritis gerakan sosial dan anarkisme dari jendela demokrasi dan keagamaan.

Dua artikel berikutnya merupakan tulisan yang sebagian data atau *remarksnya* diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta bekerja-sama dengan Pemda DKI pada tahun 2000, di mana kedua penulis ini menjadi salah satu penelitiannya. Artikel Chaider S. Bamualim, artikel kedua edisi ini, *Fundamentalisme Islam, Krisis Modernitas dan Rekonstruksi Identitas*, berupaya menjelaskan fenomena gerakan radikal Islam atau fundamentalisme Islam sebagai upaya pencarian umat Islam, terutama kaum mudanya, akan identitas eksistensial modernnya yang bersifat resistan. Sifat resistensi ini merupakan implikasi logis dari gerakan pencarian identitas mereka ke

fundamen-fundamen agama. Sebagai ilustrasi, penulis mengambil fenomena fundamentalisme Islam Indonesia kontemporer yang diambil dari penelitian di mana ia sendiri terlibat.

Artikel yang ditulis oleh Jajang Jahroni, berjudul “*Islamic Fundamentalism in Contemporary Indonesia*,” merupakan artikel ketiga edisi ini, memberikan gambaran sekilas tentang beberapa gerakan yang dicakup dalam penelitian. Penulis juga memberikan kerangka teoritis. Menurutnya, secara doktrinal, Islam radikal mempunyai landasan teologisnya dalam al-Qur’an. Secara historis, penulis menambahkan bahwa gerakan Islam radikal dapat ditelusuri sampai pada Ahmad bin Hanbal yang terus turun ke Ibn Taymiyya. Ide-ide mereka kemudian diadopsi oleh gerakan Wahhabiyah di Arab Saudi. Ketika menjelaskan gerakan munculnya fenomena gerakan ini di Indonesia, penulis menggunakan teori deprivasi kultural yang diakibatkan oleh arus modernisasi dan sekularisasi yang diterapkan di Indonesia. Deprivasi kultural ini melahirkan aleansi yang pada gilirannya memunculkan “*resistant identity*.”

Artikel keempat ditulis oleh Noryamin Aini dengan judul “*Ridda (Apostacy) and the Ambiguity of Islamic Legal Discourses*.” Di tengah maraknya berbagai tuduhan murtad yang dilontarkan oleh beberapa kelompok Islam radikal terhadap sesama saudaranya yang seiman, artikel ini mempunyai tempat yang signifikan. Penulis berpendapat bahwa konsensus jumah *fuqahā’* menyatakan bahwa hukuman bagi seorang Muslim murtad adalah pidana mati. Namun analisis hermeneutik dan kritisisme gramatologis menunjukkan sejumlah kelemahan baik dalam bentuk ambiguitas atau inkonsistensi metodologis logika hukum yang dipakai para *fuqahā’* ketika mereka menafsirkan serangkaian *nass* yang menjadi dasar penetapan hukuman mati bagi orang murtad tersebut. Satu kesimpulan yang mengakhiri tulisan ini bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dijadikan rujukan para *fuqahā’* untuk menetapkan ketentuan hukuman bagi orang murtad sarat dengan muatan politik, dan karenanya, peristiwa-peristiwa tersebut harus dilihat dalam konteksnya secara proporsional.

Sementara itu, artikel kelima “*Agama sebagai Faktor Konflik dan Integrasi*” ditulis oleh Muhamad Ali. Artikel ini mencoba menganalisis berbagai konflik yang berbau keagamaan yang akhir-akhir sedang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Maluku. Dalam analisisnya,

penulis berpendapat bahwa agama memang bisa saja diumpamakan pedang bermata dua, yang satu diarahkan untuk kebaikan (perdamaian) dan yang lainnya diarahkan untuk memotivasi konflik. Namun demikian, sebenarnya agama netral saja, bahkan semua ajaran agama mengandung perdamaian bagi semua umat manusia. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah pemanfaatan agama oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan yang berbeda. Jika kepentingan ini berbenturan, maka agama sangat mungkin untuk difungsikan sebagai bahan bakar guna menyulut konflik.

Di samping artikel-artikel tematis di atas, redaksi juga menerima beberapa artikel lepas. Pertama artikel Amsal Bakhtiar *Agama dan Tantangan Sains Modern*. Dalam tulisannya, Bakhtiar memotret tantangan dan kemungkinan peran yang dapat dimainkan agama di zaman modern ini. Sejarah mencatat selalu ada gesekan antara ilmu termasuk sains dan teknologi di dalamnya dengan cara pandang, pandangan dunia dan termasuk agama yang dianut masyarakat. Dalam setiap gesekannya selalu terjadi *sharing* baik berat sebelah atau saling mempengaruhi. Tantangan agama di zaman kemajuan sains dan teknologi adalah bagaimana agama atau agamawan merespons perubahan nilai, tradisi, dan teknik hidup yang semakin bersandar pada sains dan teknologi. Menjawab pertanyaan ini penulis yakin akan keharusan agama beradaptasi dengan situasi barunya. Sedangkan peran yang mungkin dilakukan agama di zaman modern ini adalah agama harus difungsikan sebagai *agent of values* (sumber nilai) yang memberi spirit dan moralitas universal bagi penggunaan sains dan teknologi.

Kedua, tulisan Romo Mudji Sutrisno berjudul *Humanisme Fruedian dan Pandangannya tentang Agama*. Romo Mudji menjelaskan pokok-pokok pemikiran Freud tentang *Id*, *Ego* dan *Super Ego* dan kata kunci lain yang menunjukkan humanisme Freud. Kemudian dia menganotasi beberapa karya Freud yang ada kaitannya dengan agama dan memberi catatan kritis.

Ketiga, *Profil Politik Ahmad Khan* karangan Masykur Hakim menjelaskan bahwa Ahmad Khan adalah salah satu figur intelektual Muslim India fenomenal, dikritik karena praktik agamanya yang longgar dan dipuji karena pemikirannya yang segar. Dia dianggap telah memberikan kontribusi penting dalam wacana pembaharuan pemikiran dalam Islam abad 19 di dunia Islam umumnya dan khususnya di ranah

sub-Continent. Namun demikian, selama ini, pembahasan tentangnya lebih banyak dalam pemikiran keagamaan, sosial dan pendidikan, dan masih jarang yang memotret pemikiran politiknya. Menurut penulis, secara politis, Akhmad Khan menganut pandangan yang bercampur antara pragmatisme dan idealisme. Pragmatismenya terlihat dalam sikapnya untuk mencairkan kecurigaan Inggris, penjajah, agar tidak melakukan penyerangan-penyerangan terhadap bangsa India, sedangkan idealismenya terkesan tidak realistis, seperti misalnya ia berpendapat bahwa negara harus berbasis agama dalam hal ini agama Islam, padahal mayoritas penduduk masyarakat India adalah Hindu.

Satu artikel lagi terkait dengan radikalisme agama untuk rubrik analisis buku, ditulis oleh Ismatu Ropi, dengan judul “*Melacak Akar Perang Suci: Perkembangan Ide Jihad dalam Tradisi Islam.*” Artikel ini merupakan analisis terhadap buku Reuven Firestone yang berjudul *Jihad: The Origin of Holy War in Islam*. Sebelum mengurai buku ini, penulis menyinggung sebuah paradoks yang muncul akibat perbedaan sikap dan penafsiran terhadap doktrin keagamaan. Paradoks yang dimaksud adalah bagaimana kita menjelaskan agama yang selalu mengajarkan kebaikan dan perdamaian di satu sisi, tapi juga membenarkan peperangan? Dalam konteks ini, isi buku ini menjadi penting, karena buku ini, menurut penulis, mengungkap evolusi konsep jihad dalam Islam.

Terakhir, kritik dan saran sangat kita harapkan. Untuk edisi yang akan datang kita akan memotret fenomena “gerakan” pemikiran Islam liberal sebagai pengimbang wacana gerakan “fundamentalisme” atau “radikalisme” Islam. Selamat membaca.

Ciputat, 20 April, 2002

Tim Redaksi

GERAKAN SOSIAL DAN ANARKISME: SEBUAH ANALISIS TEORITIS

Kusmana

MAKALAH ini mencoba menjelaskan hubungan antara gerakan sosial dan anarkisme. Secara teoritis anarkisme dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan protes yang bersifat gerakan sosial radikal. Untuk menunjukkan poin ini, menurut hemat penulis, bisa dijelaskan secara terpisah pengertian dan ruang lingkup wacana gerakan sosial dan anarkisme dan juga dikaitkan dengan wacana demokrasi dan agama di mana di dalam keduanya ekspresi baik bersifat gerakan-gerakan sosial maupun yang bersifat anarkis mungkin terjadi.

Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah sebuah usaha kolektif yang terorganisir dan berkelanjutan yang memfokuskan pada aspek-aspek perubahan sosial.¹ Perubahan sosial adalah perubahan apa-pun dalam karakter budaya, struktur, populasi atau ekologi dari sebuah sistem sosial.² Gerakan sosial bisa meliputi gerakan sosial apa-pun dari kelompok masyarakat tertentu

dengan latar belakang apa-pun selama mengarahkan fokus gerakannya untuk tujuan-tujuan perubahan dengan arti luas.

Dilihat dari keyakinan dan apa yang ingin diperjuangkan, gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis gerakan sosial. Pertama, Gerakan reformasi, gerakan ini berupaya untuk mengubah dan meningkatkan keadaan masyarakat mereka sendiri dalam sistem sosial mereka sendiri dengan tanpa mengubah karakter dasar sistem sosial yang mereka anut.³ Dalam masyarakat kaum buruh Indonesia akhir-akhir ini, ada kesadaran baru, yaitu tuntutan kenaikan UMR (Upah Minimum Regional). Gerakan mereka dikategorikan sebagai gerakan reformasi, karena protes dilakukan dalam sistem yang berlaku dan masih mempercayainya, serta tidak ada upaya untuk menggantinya. Yang mereka usahakan adalah adanya perbaikan pengupahan. Kedua, gerakan revolusioner. Kontras dengan gerakan reformasi, gerakan revolusioner berusaha mengubah struktur dasar atau karakteristik kultural suatu sistem. Misalnya, Gerakan sosial politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berusaha mengubah ideologi politik Indonesia dari Pancasila ke Komunisme. Terakhir, gerakan resistensi, gerakan ini tidak berusaha untuk mengedepankan perubahan, tapi sebaliknya menolak perubahan itu sendiri. Ekspresi gerakan ini bisa kemudian berupa gerakan penolakan pengaruh luar dan berupaya mencari jawaban terhadap masalah yang dihadapi dari khazanah dan kekayaan budaya dan sistem sosial sendiri. Misalnya gerakan sosial masyarakat nelayan yang berupaya untuk mencegah penggunaan pukat harimau dalam menangkap ikan. Pukat harimau merugikan mereka, karena alatnya mahal sedang kemampuan finansial mereka terbatas. Implikasinya adalah akan ada sedikit nelayan saja yang mampu membeli dan banyak dari mereka akan tergantung kepada pemodal. Hal ini akan menciptakan monopoli dan jurang yang semakin menganga antara pengguna jala tradisional dan pukat harimau. Kemudian, dikembangkan pertimbangan penggunaan jala tradisional sebagai gerakan resistensi, karena lebih menjamin eksistensi mereka, misalnya, sumber daya ikan yang terjaga ketersediaannya, para nelayan tidak semakin termiskinkan dan kelestarian alam terjaga dll.

Secara historis, gerakan sosial yang diarahkan pada perubahan sosial dapat dirujuk pada abad 18 dan 19 yang dilatarbelakangi oleh revolusi industri dan politik yang mengiringi perkembangan demokrasi. Pada awal perkembangan secara teoritis, gerakan sosial diarahkan pada pencarian

pengembangan hukum-hukum universal yang dapat memotret perkembangan masyarakat yang kompleks. Perkembangan berikutnya atau tepatnya perkembangan kontemporer, fokus gerakan sosial diarahkan pada perubahan sosial dalam aspek-aspek kehidupan tertentu, seperti politik, agama, ekonomi, teknologi dan keluarga.⁴

Dalam sosiologi dan ilmu politik kita mengenal berbagai macam jenis gerakan sosial seperti teori agresi frustrasi (*frustration aggression theory*), teori mobilisasi sumber (*resource mobilization theory*) dan teori proses politik (*political process theory*) atau teori politik kesempatan (*political opportunity theory*). Teori agresi frustrasi sebenarnya merupakan ciri utama gerakan sosial klasik yang berpendapat bahwa pada dasarnya gerakan sosial itu muncul sebagai jalan kolektif bagi individu-individu untuk bisa lepas dari berbagai persoalan kerusakan (*strain*) dan kesengsaraan (*distress*) yang emosional.⁵ Teori ini beranggapan bahwa gerakan sosial muncul ketika frustrasi mendorong perilaku kolektif yang sering-kali agresif. Frustrasi itu sendiri mempunyai sumber yang beragam. Terkadang dihasilkan sebagai akibat dari frustrasi atau deprivasi (*deprivation*) yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang lemah atau karena operasi sosial. Perilaku deprivasi bisa mengambil dua bentuk ekspresi: absolut dan relatif. Perilaku absolut muncul ketika memang suatu masyarakat mempunyai perangkat dan bekal yang tidak cukup. Sedangkan perilaku relatif muncul ketika masyarakat mempunyai bekal yang cukup tapi mereka kekurangan kalau dibandingkan dengan masyarakat sekelingnya.⁶

Ada yang berpendapat frustrasi tidak selalu muncul dari keadaan serba kekurangan, tapi bisa juga terjadi ketika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat kemudian terjadi sesuatu seperti krisis ekonomi atau perang sehingga membuat keadaan mereka berbalik memburuk. Kenyataan ini menimbulkan kepanikan dan kemudian mendorong gerakan sosial. Teori ini dikenal dengan kurva J (*J-Curve*).⁷

Secara umum, teori agresi frustrasi tidak banyak digunakan dalam analisis gerakan sosial modern dan kontemporer. Para peneliti kesulitan mengaitkan antara gerakan sosial dengan tingkat frustrasi suatu masyarakat atau kelompok. Salah satu penemuan mengindikasikan bahwa mereka yang melakukan gerakan sosial tidak sefrustrasi mereka yang tidak melakukan protes. Organisasi dan pemeliharaan gerakan sosial memerlukan tidak hanya dorongan emosi saja, tapi aspek lainnya.⁸

Penilikan aspek-aspek lain melahirkan teori mobilisasi sumber. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial didasarkan pada sumber-sumber seperti waktu, uang, keterampilan organisasi dan lain-lain semisalnya, serta kemampuan untuk memanfaatkannya.⁹ Lahir sebagai kritik atas gerakan sosial klasik, teori ini di awal kemunculannya dianggap sebagai terobosan besar dalam sosiologi gerakan sosial. Teori mobilisasi sumber terfokus pada pendayagunaan aspek-aspek luar dan bukan psikologis seperti teori sebelumnya. Dengan kata lain, teori ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, terorganisir dan sistematis.¹⁰

Analisis teori mobilisasi sumber tepat digunakan untuk menjelaskan gerakan sosial yang berkaitan dengan alam dan sumber-dayanya seperti gerakan anti pengruksakan lingkungan atau anti nuklir. Sebaliknya, teori ini kurang berguna dalam menjelaskan gerakan sosial kaum minoritas yang terdeprivasi. Namun demikian disinyalir teori ini terlalu menekankan pada pentingnya faktor-faktor di luar sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, seperti gerakan sosial kulit hitam di Amerika Serikat.¹¹

Terakhir, teori proses politik. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa kesuksesan sebuah gerakan sosial bergantung tidak hanya pada sumber-sumber sosial gerakan, tapi juga pada sistem sosial yang dominan, seperti pemerintah. Mendukung dan tidak mendukungnya pihak pemerintah akan sangat berpengaruh pada kesuksesan sebuah gerakan sosial.¹² Teori ini mendudukan gerakan sosial dalam konteks hidup bermasyarakat yang lebih luas yaitu bernegara. Salah satu pemain penting dalam bernegara adalah organisasi negara itu sendiri. Teori mobilisasi sumber mengabaikan faktor ini, padahal dalam realitas sehari-hari, sering-kali kita melihat kegagalan gerakan sosial, bukan karena mereka tidak mempersiapkannya dengan baik, tapi sikap negara tidak diperhatikan, sehingga ketika negara mengambil sikap oposisi terhadap gerakan, gerakan itu menghadapi halangan yang sangat besar. Oleh karenanya, gerakan revolusi politik akan berhasil manakala negara lemah.

Anarkisme

Anarkisme berasal dari bahasa Yunani, terbentuk dari *an* bermakna *tanpa*; dan *archos* bermakna penguasa.¹³ Pengertian populer anarkisme merujuk ke kata anarki yang berkonotasi peyoratif yang hanya konsentrasi pada “pemboman dan terorisme.”¹⁴ Sedang terminologi anarkisme itu

sendiri merujuk pada “teori keberadaan (eksistensi) yang pernah diintrodusir oleh manusia paling ramah dan jiwa paling berbudaya di Eropa,”¹⁵ yaitu sebagai “suatu paham yang menolak semua bentuk pranata kenegaraan maupun wewenang yang mencampuri tindakan spontan tiap pribadi.”¹⁶ Penolakan masyarakat terhadap semua bentuk pranata kenegaraan muncul karena kekecewaan-kekecewaan atas peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga suatu pemerintahan di mana elite politik, pemerintah dan aktor-aktor lain yang menjamin terselenggaranya roda pemerintahan tidak memfungsikan diri untuk sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat, tapi sebaliknya untuk sebanyak-banyaknya kepentingan pemerintah. Karenanya kemudian, negara dipandang sebagai “gudang serta sumber korupsi dan ketidak-teraturan dalam tubuh politik.”¹⁷ Kenyataan ironis dari sepak terjang pemerintahan seperti ini menumbuhkan pertanyaan fundamental di sebagian kalangan yang kemudian dikenal sebagai anarkis, yaitu kenapa peran negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat tapi berbalik menjadi pemeran rakyat? Pencarian jawaban terhadap upaya memperbaiki peran pemerintah bagi rakyatnya, bagi kalangan anarkis, dianggap *deadlock*, karena kenyataan-kenyataan baik itu dalam pemerintahan otoritarian maupun pemerintahan demokratis sekalipun menunjukkan bahwa pemerintah merusak sifat baik manusia yang cenderung kerja sama, pemerintah telah “menunggangi dan memeras manusia dengan tindakan yang memaksa,”¹⁸ dan pemerintah juga yang seharusnya menjadi penjamin terpeliharanya hukum dan keteraturan (*law and order*), malah menjadi perusak (*destroyer*) hukum dan keteraturan.

Anggapan tidak ada solusi terhadap kenyataan kerusakan suatu masyarakat di bawah suatu pemerintahan memunculkan anggapan bahwa suatu masyarakat tidak seharusnya dikelola oleh suatu pemerintahan dan kaum anarkis percaya bahwa manusia itu makhluk sosial yang cenderung kerja-sama¹⁹ dan bisa membangun kebersamaan secara suka rela tanpa pranata negara, paksaan dan kekuatan pemaksa.²⁰ Karenanya, anarkis tidak mengidealkan masyarakat tanpa keteraturan, keteraturan tersebut mereka yakini dapat diwujudkan dalam suatu masyarakat yang dikelola oleh asosiasi sukarela, melalui kelompok-kelompok swakelola.²¹ Untuk memulai suatu tatanan masyarakat baru tanpa ada otoritas pemaksa, para anarkis-pun –terutama anarkisme individualis ekstrem– percaya bahwa tidak ada jalan kecuali menolak (*resist*), dan kalau perlu “melenyapkan dulu” segala

sistem pemerintahan yang ada, baru kemudian membangun masyarakat baru. Menariknya jalan untuk mewujudkan masyarakat “yang dicita-citakan” diyakini dapat ditempuh secara bervariasi, sebagian meyakini cara evolusi, seperti Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), dan sebagian lain, percaya akan cara revolusi seperti Michael Bakunin (1814-1876).

Nature atau fitrah wilayah anarkisme adalah persoalan eksistensi sosial atau bersama dari sejumlah individu, karenanya anarkisme kemudian dipandang sebagai upaya teoritis untuk melihat fenomena organisasi sosial yang merepresentasikan individualisme ekstrem.²² Persoalan hubungan antara satu individu dengan lainnya individu atau kelompok, satu kelompok dengan lainnya kelompok atau individu, atau rakyat dengan pemerintah adalah persoalan politik, maka anarkisme menjadi salah satu ideologi atau filsafat politik. Secara ideologis, anarkisme menjadi gerakan yang menganggap negara harus dihancurkan dan di atasnya dibangun masyarakat baru secara suka rela dan tanpa kekerasan atau kekuatan pemaksa.²³ Sedangkan secara filosofis, ia menjadi paham bahwa “masyarakat bisa dan sudah seharusnya eksis tanpa aturan-aturan.”²⁴ Sejumlah kelompok pecinta lingkungan hidup khususnya dari Jerman dan Amerika Serikat memasukkan anarkisme ke dalam filosofi politik. Hal ini terlihat dalam keinginan-keinginan besar konservasi lingkungan seperti dalam karya Ursula Le Guin *Dispossessed* (1974) dan Ernest Callenbach *Ecotopia* (1975) yang terpengaruh oleh karya-karya ekotopia-ekotopia anarkis seperti tulisan William Morris *News from Nowhere* (1890) dan tulisan Aldous Huxley *Island* (1962).²⁵

Sejarah dan Tipologi Anarkisme

Gerakan anarkisme berawal dari anarkisme religius, dan sering-kali Nabi Isa dan Budha Gautama dianggap sebagai anarkis pertama. Anarkisme religius biasanya ditandai dengan muncul seorang figur yang menerima dan mendapat amanat untuk menyampaikan pesan Ilahi kepada masyarakat. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah Nabi dan Rasul lainnya selain Nabi Adam tentunya, karena kemunculan mereka pada umumnya memandang ada keperluan mendasar untuk memperbaiki keadaan dan cara berada sekelilingnya. Isi pesan biasanya menyuarakan keadilan, kejujuran dan perbaikan keadaan yang di satu pihak mengancam eksistensi penguasa dan di pihak lain memberi harapan perbaikan bagi

masyarakat tertindas. Figur-figur religius seperti Isa dan Muhammad untuk agama samawi dan Budha untuk agama bumi mempunyai daya tarik yang luar biasa. Kumar yakin bahwa sekian gerakan-gerakan sosial abad pertengahan di Eropa dan Cina diilhami oleh anarkisme Kristen dan Budha.²⁶ Anarkisme religius tidak menampakkan fenomena yang stagnan, di zaman modern muncul tokoh-tokoh seperti Tolstoy dan Gandhi,²⁷ bahkan di zaman pos modernisme dan kontemporer dengan semangat pluralisme dan kebebasan individunya, anarkisme religius menunjukkan vitalitasnya, seperti fenomena gerakan spiritualitas yang menentang keterbelakangan kelembagaan agama.

Pengaruh pencerahan dan revolusi industri yang ditandai dengan kritik tajam terhadap lembaga-lembaga keagamaan, perubahan orientasi keilmuan dari metafisik ke empirik, positivistik dan rasional melahirkan model anarkisme baru yang sekuler, ekstrem dan komunistik. Akar-akar pergeseran ini bisa dilacak dalam romantisme Rousseau ataupun rasionalisme Godwin. Generasi pertamanya bisa ditemukan dalam pemikiran “anak tiri” Godwin, Shelley, kemudian penerusnya bisa dilacak pada Sosialis Perancis Proudhon, filsuf egoisme Jerman Max Stiner, individualis Amerika Thoreau dan pemberontak aristokratis Rusia Michael Bakunin dan Peter Kropotkin.²⁸

Di Rusia gerakan anarkisme merebak cukup kuat terutama pada masa revolusi dan beberapa saat setelahnya. Gerakan anarkisme kemudian, terutama sejak tahun 1921 mendapat tekanan yang ditandai dengan meningkatnya penindasan Kronstandt dan pengekangan terhadap orang-orang Uni Soviet. Gerakan anti anarkisme ini menyebabkan kekalahan dan melemahnya gerakan anarkisme di Rusia. Namun demikian, gerakan anarkisme terus bergulir di belahan bumi lainnya, seperti di Spanyol tahun 1930-an, di Hongaria tahun 1956-an dan di Paris tahun 1968-an.²⁹

Secara gagasan, sejarah anarkisme dapat dilacak dari ukuran bahwa “otoritas adalah dalam dirinya sesuatu yang tak diangankan, dan bahwa manusia mendapatkan ukuran yang penuh *stature*³⁰nya hanya ketika dia dibolehkan untuk mengembangkan individualitasnya secara absolut tidak dikontrol,”³¹ dan ini sama sekali bukan hal baru. Taylor menjelaskan bahwa beberapa kali gagasan seperti ini dikemukakan oleh sekte Mistik dan Anabaptist dalam periode pertengahan dan pos reformasi. Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa di abad 13 ada satu sekte Beghards yang menyebut

diri mereka sebagai *Brother and Sisters of Free Spirit* yang mempunyai pandangan panteistis. Kelompok ini mempunyai anggapan bahwa kebebasan puncak diinferasi dari Tuhan ada di mana-mana, sehingga diyakini sebaliknya yaitu kehendak seorang individu juga merupakan kehendak Tuhan. Mereka mendakwakan masyarakat pemilik dan masyarakat perempuan, juga mereka menekankan pemerataan individu (*personal equality*) dan menolak semua bentuk otoritas. Pada periode sebelum muncul revolusi Perancis, tersebar cepat gagasan bahwa prasyarat hidup normal adalah direpresentasikan oleh 'Paul dan Virginia', yaitu satu kondisi bahwa manusia itu bersifat memenuhi diri (*self-sufficing*), mandiri, tidak memiliki kepemilikan orang lain kecuali kepunyaannya sendiri. Gagasan seperti ini terus bergulir, misalnya tahun 1795, William Godwin dalam bukunya *Inquiry Concerning Political Justice*, mendukung masyarakat pemilik, masyarakat yang mengatur dirinya sendiri (*the Self Government of Mankind*) yang didasarkan pada hukum keadilan, penghapusan semua bentuk pemerintahan dan penghapusan lembaga pernikahan.³²

Perkembangan selanjutnya seperti diterangkan di atas, gagasan anarkisme berkembang dengan dimensi yang beragam dari moderat, ekstrem, ideologis, politis sampai berdimensi filosofis. Selanjutnya akan diterangkan lebih jauh dengan jendela tipologi.

Tipologi Anarkisme: Memetakan Ajaran Anarkisme

Fenomena anarkisme bisa dijelaskan dengan cara dan klasifikasi yang bermacam-macam,³³ dalam hal ini akan dijelaskan hanya melalui bagaimana cara gagasan anarkis itu diperjuangkan, yaitu terbagi ke dalam dua tipologi: anarkisme evolusionistik dan revolusionistik. Walau anarkisme merefleksikan keragaman dimensi, *common platform*-nya sama, yaitu sama-sama mempunyai "sikap oposisi terhadap bentuk-bentuk pemerintahan yang memaksa dan anggapan despotisme mayoritas dalam sebuah demokrasi adalah hanya sedikit kurang dibenci dari pada despotisme sebuah monarki."³⁴

1. Anarkisme Evolusionistik

Anarkisme evolusionistik mempunyai keyakinan bahwa untuk sampai pada kesadaran kolektif akan tidak perlunya pemerintahan di satu sisi, dan perlunya hidup bersama berdasar kebebasan dan tanpa paksaan, paling baik dicapai dengan cara evolusi atau dengan proses yang cermat dan

terukur. Prosesnya adalah kesadaran yang *output*-nya bisa diukur dengan keyakinan bahwa semakin masyarakat tercerahkan dengan hakikat keberadaan mereka dalam suatu pemerintahan, mereka akan semakin merasakan signifikansi alternatif cara hidup bersama tanpa pemerintahan.³⁵

Pelopop anarkisme evolusionistik dan dianggap sebagai bapak anarkisme modern adalah Pierre Joseph Proudhon,³⁶ seorang Perancis yang sederhana lahir tahun 1809. Proudhon hidup dalam konteks hiruk pikuk abad sembilan belas dan di mana sistem pemerintahan ada dalam fase kritis serta kenyataan bahwa ia dipengaruhi pemikiran filsafat zamannya terutama Hegel. Dalam tahun 1840 Proudhon menerbitkan karyanya yang pertama *What is Property?* Di dalamnya dia menolak semua hukum dan otoritas, tapi dalam karya yang lain *The Federative Principle* (1863) memodifikasi sikap dia tentang pemerintah dan menawarkan apa yang disebut *self-governing communities* (masyarakat swakelola) karena dia menganggap negara itu *the scourge of God* (Godam Tuhan).³⁷ Karenanya, dia menjawab pertanyaan yang menjadi judul karya pertamanya, *property is robbery* (properti adalah perampokan), dalam artian kekayaan yang didapat melalui pemanfaatan tenaga kerja kaum buruh, kaum buruh tidak mendapatkan bagian selayaknya dan yang mendapat bagian lebih besar adalah kelompok kecil yang menjadi pemilik modal. Kalau diteliti, sebenarnya frase tersebut diaplikasikan lebih pada metode akuisisi modern dari pada properti itu sendiri.³⁸

Pemikiran Proudhon banyak mirip dengan pemikiran zamannya terutama Karl Marx, yaitu bahwa modal terkristalisasi dalam kerja (*labour*) dan kekayaan. Kerja adalah sumber nilai dan nilai kerja harus diukur dengan durasinya. Proudhon sama dengan Louis Blanc dalam bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan kemiskinan dalam konteks masyarakat kerja. Blanc berharap supaya terjadi distribusi yang adil dan tidak terjadi penumpukan harta pada sekelompok orang dan pemiskinan di kelompok lain, maka harus dilakukan di bawah otoritas pemerintah. Sementara, Proudhon beranggapan bahwa distribusi yang adil dapat dicapai dengan inisiatif bebas masyarakat tanpa bantuan otoritas negara seperti diyakini Blanc.³⁹

Setelahnya, banyak pemikir lain yang terpengaruh dengan pemikiran Proudhon seperti di Amerika Serikat Benjamin R. Tucker (1854-1939), di Jerman Moses Hess (1812-1875) dan Max Stiner (1806-1856).

2. Anarkisme Revolusioner

Anarkisme revolusionistik menyertakan gerakan pada kesadaran mereka yang menolak semua bentuk dan bagian dari negara. Pendukung anarkisme ini berkeyakinan bahwa tidak ada cara terbaik untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan -yaitu masyarakat tanpa negara dan kekerasan, kecuali menghancurkan terlebih dahulu semua tatanan hukum dan negara. Adalah pemikir Rusia, Mikhail Bakunin (1814-1876) yang mengubah arah perubahan yang dicita-citakan kaum anarkis dari perubahan yang damai ke perubahan dengan kekuatan, yaitu dengan cara-cara penggunaan pemaksaan dalam melakukan upaya perbaikan masyarakat atau untuk menghancurkan lembaga negara itu sendiri.⁴⁰ Sifat revolusioner gagasan anarkis Bakunin dimaksudkan untuk penghancuran semua tatanan yang ada baik dalam keimanan, moralitas, ekonomi maupun politik. Lebih jauh “dia menolak untuk mempertimbangkan persoalan rekonstruksi, karena semua pembicaraan tentang masa depan adalah kriminal, karena ia menghalangi pengrusakan murni, dan mengganjal jalannya revolusi.”⁴¹

Di tangan penerus atau simpatisan gagasan revolusioner anarkisme Bakunin, seperti Netschajeff (murid langsung Bakunin) dan Pyotr Kropotkin, anarkisme menjadi gerakan yang sangat revolusioner bahkan mengarah terorisme. Misalnya, saking kerasnya gagasan yang dikembangkan Netschajeff, dia dianggap lebih sebagai teroris dari pada anarkis. Baginya anarkisme adalah “murni gerakan pengrusakan.”⁴²

Pandangan Netschajeff tercermin dalam *the Revolutionary Catechism*⁴³ yaitu bahwa sebuah revolusi harus ditegakkan dengan tidak membiarkan apa-pun mempengaruhi antara dirinya dengan usaha penghancuran. Kalau dia kemudian terus hidup dalam lingkungan yang ada dalam wilayah penghancuran, ini hanya karena untuk lebih menjamin upaya menghancurkan semua pranata kenegaraan. Suatu revolusi, baginya, menganggap semua hal yang doktriner sia-sia dan tidak menganggap sains dan ilmu pengetahuan dunia ini agar dibiarkan untuk generasi mendatang, dia hanya mengenal satu sains, yaitu ilmu penghancuran. Untuk maksud ini dia belajar mesin, fisika, kimia, dan kedokteran.

Lebih jauh Netschajeff berpendapat bahwa obyek gerakan revolusi ini adalah mengupayakan cara terbesar dan paling efektif yang mungkin untuk penghancuran tatanan yang ada. Metodenya tidak ada ambiguitas, perlakuan diskriminatif dileburkan ke dalam perbedaan kelas, yang kaya

dimaafkan tapi dijadikan budak/ pembantu kaum proletariat dan hartanya digunakan untuk keperluan revolusi. Untuk penguasa tidak ada perlakuan maaf sama sekali. Teror disertakan untuk membangun kesadaran perlunya revolusi. Aktif terorisme adalah bagian dari revolusi.⁴⁴

Anarkis revolusioner lain sering diatribusikan kepada Pyotr Kropotkin (1842-1921). Kropotkin dikenal sebagai bapak anarkisme komunis. Dia melihat penting fungsi pasar dan yakin bahwa kebutuhan sosial bisa dipenuhi melalui kooperasi sukarela dalam tempat-tempat kerja dan lokal komunal (kebersamaan).⁴⁵ Gagasan pokok anarkisme Kropotkin terletak pada pandangan bahwa sistem pemerintah, kompetisi dan properti swasta yang ada sekarang, tidak bisa diperbaiki tanpa dihancurkan terlebih dahulu, masyarakat harus kembali menyadari elemen-elemen dasar pembentuknya dan melakukan reagregasi sendiri. Kropotkin menolak hak kepemilikan properti swasta atas dasar bahwa kita harus kembali ke keadaan masyarakat yang belum berbudaya di mana kita menemukan tidak ada hak properti swasta seperti itu. Ketika pemerintah yang ada telah dihancurkan dan individu-individu dibiarkan bebas untuk mereagregasi sendiri, setiap orang akan mengambil tempat di kelompok yang dia suka, dan kelompok-kelompok tersebut menjaga kebebasan mereka sendiri dan pada saat yang sama mengembangkan sikap saling membantu dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pemerintah. Hubungan antar individu atau kelompok dicapai melalui kesepakatan sukarela dan karena kesepakatan dicapai secara sukarela, maka tidak perlu ada kekuatan pemaksa dari otoritas apa-pun.⁴⁶

Kropotkin kemudian menjelaskan tidak sahnya kepemilikan properti swasta, yaitu bahwa tanah telah diolah oleh generasi terdahulu. Produksi masyarakat sekarang adalah hasil dari penciptaan yang berlimpah yang sekarang telah menyatu dalam *the general producing machine* (mesin produksi umum). Kita hanya bisa memproduksi sebagai suatu konsekuensi apa yang telah diproduksi generasi masa lalu. Siapa kemudian individu yang mempunyai hak untuk mengambil bagian terkecil dari keseluruhan yang luar biasa besar, yaitu untuk mengatakan, “Saya telah memproduksi ini dan ini milik saya.”⁴⁷

Walau gagasan Kropotkin dianggap utopia terutama banyak orang meragukan bagaimana gagasan tersebut dapat diaplikasikan dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern ini, banyak kalangan terinspirasi oleh pikirannya, dalam bentuk anarkisme sosial. Pengaruh terbesar

ada dalam dunia politik: anarkisme sosial membantu meradikalisasi gerakan-gerakan pekerja di akhir abad 19 dan awal abad 20 di Eropa khususnya Perancis, Italia dan Spanyol.⁴⁸

Anarkisme dan Demokrasi

Di atas dikatakan bahwa anarkisme sedikit lebih kurang membenci demokrasi dari pada otorianisme. Hal itu dapat dimengerti karena sebagian dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh demokrasi sejalan dengan gagasan yang dikembangkan oleh anarkisme. Secara normatif kesejajaran ini dapat ditunjukkan, yaitu bahwa demokrasi mengandung tiga nilai berikut ini: 1). Kompetisi ada dalam perebutan posisi, dan pemilihan yang *fair* untuk pejabat publik muncul dalam interval waktu tertentu tanpa penggunaan kekuatan dan tanpa mengeluarkan kelompok sosial tertentu, 2). Penduduk berpartisipasi dalam penyeleksian pemimpin mereka dan pembuatan kebijakan-kebijakan, dan 3). Kebebasan sipil dan partai ada untuk menjamin integritas kompetisi politik dan partisipasi.⁴⁹

Anarkisme adalah momok demokrasi dan ia telah menjadi pengkritik yang paling tajam terhadap demokrasi representatif model Barat. Miller meringkas tiga poin kritik utama anarkisme atas demokrasi. *Pertama*, negara demokrasi adalah masih sebuah negara: cara operasinya memperlihatkan insensitivitas yang sama terhadap kebutuhan sosial, seperti yang lebih kuat dalam sistem politik otoritarian. *Kedua*, seorang demokrat sering mengklaim bahwa apa yang direpresentasi dalam demokrasi representatif adalah keinginan rakyat, yang menginformasikan dan mengontrol kebijakan pemerintah. Tetapi, menurut kaum anarkis, gagasan dari keinginan tunggal dan konsisten populer adalah merupakan sebuah mitos. Masyarakat terbagi-bagi dalam pikiran mereka, pendapat mereka berubah-ubah, sebagian lebih baik dari lainnya. Adalah semena-mena untuk menganggap bahwa sebuah pendapat mayoritas, yang diekspresikan oleh seorang calon dalam satu suatu kesempatan, menentukan keinginan rakyat. *Ketiga*, kaum anarkis mengkritik gagasan representasi populer dalam dewan permusyawaratan rakyat. Mereka berargumentasi bahwa ketika rakyat diminta untuk memilih perwakilan mereka, mereka cenderung untuk memilih mereka yang kelihatan terdidik dan artikulasi gagasannya bagus. Dengan kata lain, mereka cenderung memilih perwakilan mereka dari kalangan kelas menengah. Bahkan kalau anggota kelas pekerja berkeinginan memilih perwakilannya dari kalangan mereka, keinginan ini

kemudian segera akan terkorupsi oleh posisi baru mereka sebagai abdi negara.⁵⁰

Miller menguatkan pendapat di atas dengan pendapat Bakunin dan Proudhon. Bakunin berpendapat bahwa pekerja dipilih untuk jadi bagian dari pemerintahan akan ditransformasikan hampir seketika dari demokrat ke seorang otoritarian aristokrat baru. Proudhon mengkonfirmasi bahwa dia mengalami hal itu ketika dia terpilih menjadi ketua the Constituent Assembly tahun 1848. Dia merasakan dirinya tersedot ke dalam urusan pemerintahan, dan dengan cepat menemukan dirinya berjarak dari kebutuhan dan keinginan konstituennya.⁵¹

Namun demikian, kaum anarkis menyisakan sedikit ruang bagi demokrasi, yaitu dalam pembuatan keputusan kolektif dalam konteks masyarakat ideal. Konkretnya, setiap orang akan membuat perjanjiannya dengan lainnya berdasarkan cita rasa dan kecenderungannya masing-masing. Demokrasi langsung mungkin dapat tempat bagi anarkis idealis, tapi dengan tetap akan tersubordinasi dalam prinsip kebebasan persetujuan dan tanpa paksaan.⁵²

Gerakan Sosial, Anarkisme dan Agama

Seperti disinggung sebelumnya agama muncul, dengan ungkapan yang diperhalus, sebagai “upaya perbaikan” atas tatanan masyarakat yang ada dan dapat berfungsi sebagai sumber nilai, motivasi gerakan dan landasan atau kacamata menilai realitas untuk usaha menuju perubahan. Dengan potensi seperti ini, agama bersama ideologi dan paham lain seperti, kebebasan individual yang diusung paham kapitalisme dan pemerataan bersama yang diusung marxisme, pluralisme yang diusung demokrasi, dimungkinkan dijadikan salah satu sumber gerakan sosial sampai level gerakan anarkisme. Pertanyaannya adalah model-model gerakan sosial dan anarkisme apa saja yang mungkin di mana di dalamnya agama dapat berperan?

Dengan mencermati uraian di atas, jawaban pertanyaan tersebut setidaknya menurut hemat penulis ada tiga model ekspresi gerakan. Usaha-usaha gerakan sosial berdimensi keagamaan dapat dalam bentuk reformasi, resistensi dan revolusi. Gerakan sosial keagamaan reformatif dapat ditemukan misalnya usaha-usaha masyarakat agama untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU. Gerakan sosial keagamaan yang resisten, keluar, berbentuk penolakan

terhadap paham, atau budaya yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama seperti budaya hedonistik yang mendorong manusia hanya untuk bersenang-senang saja, dan ke dalam, berbentuk upaya untuk menjernihkan ajaran agama dan menjadikannya sebagai *way of life* dan *worldview* yang mengarahkan cara bereksistensi mereka atau pembentukan identitas. Di Indonesia di tahun awal-awal setelah kemerdekaan sampai tahun 1970-an, kaum muslim seperti dari kalangan Persatuan Islam Indonesia (PERSIS) menunjuk sikap yang sangat puritan dan menolak pengaruh Barat. Pimpinan PERSIS, A. Hasan sendiri terlibat dalam debat terbuka dengan mantan Presiden RI pertama, Soekarno seputar wacana nasionalisme.

Sedangkan gerakan sosial keagamaan yang revolusioner terjadi pada level hubungan penjajah dan terjajah. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, hampir di seluruh wilayah Islam yang terjajah muncul kesadaran untuk bisa lepas dari kaum penjajah seperti Inggris, Perancis, Portugis dan Belanda. Gerakan anti penjajah ini dipicu oleh banyak faktor, tapi satu hal adalah jelas yaitu habisnya kepercayaan masyarakat terjajah terhadap penjajah. Di antara gerakan sosial revolusioner adalah gerakan yang didasari kepercayaan agama, seperti apa yang terjadi di Libya dengan gerakan Sanusiyahnya. Kelompok agama ini sangat berjasa dalam usaha rakyat Libya melepaskan diri dari penjajah baik Inggris, Perancis, “Turki” maupun Italia. Di Indonesia, walau bukan faktor satu-satunya, gerakan revolusi kemerdekaan banyak didukung oleh agamawan terutama kaum muslimin. Untuk zaman modern, gerakan revolusi di Iran di bawah komando Imam Khomeini yang berhasil menggulingkan kekuasaan Shah adalah contoh lain.

Dua model terakhir, resistensi dan revolusi, sangat mungkin berdimensi anarkis karena dasar gerakan yang mendasarinya, yaitu keduanya mempunyai sikap menolak akan unsur luar atau atas sistem apa yang sedang berjalan. Agama di samping menyediakan konsep, nilai dan keyakinan, juga bisa dijadikan identitas dan wadah untuk suatu tujuan seperti gerakan sosial. Jihad dalam Islam atau *martyrdom* di tradisi agama lain, adalah alat sekaligus tujuan yang efektif untuk menggerakkan massa untuk tujuan-tujuan yang tentunya sesuai atau “dianggap sesuai” dengan ajaran agama. Efektivitas agama untuk menggerakkan massa, dalam keadaan tertentu melampaui gerakan sosial sekuler yang dasarnya adalah pertimbangan rasional, kesamaan kepentingan dan insentif selektif, karena orang

digerakkan dengan stimulus kesucian dan keilahian yang dalam masyarakat beragama merupakan segalanya. Anarkisme gerakan sosial keagamaan, secara teoritis, bisa muncul dengan asumsi agama digunakan dalam politik untuk misalnya mengubah semua tatanan politik yang dengan tatanan politik yang baru, seperti, tatanan politik Shah yang marxis diubah dengan tatanan politik yang “Islami.”

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anarkisme dalam hubungannya dengan gerakan sosial pada dasarnya merupakan ekspresi protes yang didasarkan pada penurunan kepercayaan yang tajam atas apa yang berjalan di sekelilingnya. Model protes dalam gerakan sosial bisa berbentuk reformatif, resistentif dan revolusionalistik, sedangkan model anarkistik bisa dalam bentuk evolutif dan revolutif. Anarkisme dalam sistem negara yang demokratis, memungkinkan kelompok-kelompok anarki untuk hidup dan berekspresi, namun sebenarnya, demokrasi tidak beda dengan Sistem otorianisme sama-sama dibenci, tapi demokrasi lebih sedikit dimusuhi. Selanjutnya, anarkisme juga dapat muncul dalam gerakan sosial keagamaan resistentif dan revolusionistik dalam bentuk perlawanan atas kekuatan seperti penjajah atau hegemoni budaya, atau dalam bentuk pencarian identitas. *Wa Allāh a'lam bi al-Shawāb*

Catatan Kaki

1. Allan G. Johnson, *The Blackwell Dictionary of Sociology: A User's Guide to Sociological Language* (Malden: Blackwell Reference, 1997), h. 262.
2. *Ibid.*, h. 255.
3. *Ibid.*, h. 262.
4. *Ibid.*, h. 255.
5. *Ibid.*, h. 40.
6. *Ibid.*, h. 115.
7. *Ibid.*, h. 116.
8. *Ibid.*
9. *Ibid.*, h. 234.
10. *Ibid.*
11. *Ibid.*
12. *Ibid.*, h. 205.
13. Kusananto Anggoro dan Bambang S. Utomo, "Anarkisme," dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia* – jilid 2 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988), h. 26.
14. R. Bruce Taylor, "Anarchy, Anarchism," dalam *Encyclopedia of Religion and Ethics* – Vol. 1 (Edinburgh: T & T Clark, 1971), h. 419-420.
15. *Ibid.*, h. 420.
16. Anggoro dan Utomo, "Anarkisme," h. 26.
17. Krishan Kumar, "Anarchism," dalam *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial* edisi ke 2 jilid 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.), h. 27.
18. Anggoro dan Utomo, "Anarkisme," h. 26.
19. *Ibid.*
20. David Miller, "Anarchism," dalam *The Encyclopedia of Democracy*, edited by Seymour Martin Lip-set (London: Routledge, 1995), 60.
21. Alan H. Smith (ed.), "Anarchism," dalam *The Encyclopedia Americana* (Danbury: Grolier Incorporated International Headquarters, 1829), 777.
22. *Ibid.*
23. Miller, "Anarchism," h. 60.
24. Kumar, "Anarchism," h. 27.
25. *Ibid.*
26. *Ibid.*
27. *Ibid.*
28. *Ibid.*
29. *Ibid.*
30. Artinya "pencapaian kualitas dan reputasi manusia yang diraih dengan usahanya sendiri". Lihat, A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 4th edition (Oxford: Oxford University Press, 1989), h. 1254.
31. Taylor, "Anarchy, Anarchism," h. 420.
32. *Ibid.*
33. Misalnya, dilihat dari model ekspresinya yang perjuangkan anarkisme, bisa dikategorikan ke dalam gerakan dan pemikiran. Sebagai gerakan, anarkisme dilihat dari sisi bagaimana kaum anarkis memperjuangkan cara berada yang dicita-citakan, sedang secara pemikiran, anarkisme lebih dilihat sebagai upaya teoritis pencarian model berada yang ideal. Dilihat dari pengkaitan ajaran agama, anarkisme bisa dibagi ke dalam anarkisme religius dan sekuler. Anarkisme religius adalah upaya perubahan cara berada yang didasarkan pada ajaran agama, sedang anarkisme sekuler sebaliknya, yaitu perubahan cara berada

didasarkan kebebasan dan pertimbangan rasional semata. Dilihat dari basis sentral pendasaran argumentasinya, anarkisme dikategorikan ke dalam anarkisme individualistik dan komunistik. Anarkisme individualistik melihat cara ideal berada dengan memberikan kebebasan total pada individu atau kepentingan individu jadi pijakan untuk merumuskan cara berada yang tidak terkooptasi oleh pemerintah dan tanpa kekerasan. Sedang anarkisme komunistik menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan menolak hak kepemilikan individu. Masyarakat yang menganut sistem negara (kapitalistik), sistem kompetisi dan pemilikan pribadi harus dihentikan, kemudian masyarakat membangun cara keberadaan baru tanpa kekerasan. Terakhir, anarkisme dilihat dari cara bagaimana gagasan anarkis itu diperjuangkan, bisa dikategorikan ke dalam anarkisme evolusionistik dan revolusionistik.

34. Smith (ed.), "Anarchism," h. 777.
35. Taylor, "Anarchy, Anarchism," h. 420.
36. Dia juga dianggap sebagai bapak anarki individualisme. Smith (ed.), "Anarchism", h. 778.
37. *Ibid.* 777.
38. *Ibid.*
39. Taylor, "Anarchy, Anarchism," h. 420.
40. Smith (ed.), "Anarchism," h. 778.
41. Taylor, "Anarchy, Anarchism," h. 420.
42. *Ibid.*, h. 421.
43. Pada awalnya buku ini merupakan karya Bakunin, tapi sekarang karya ini diatribusikan ke Netschajeff sendiri. *Ibid.*
44. *Ibid.*
45. Miller, "Anarchism," h. 61.
46. Taylor, "Anarchy, Anarchism," h. 422-3.
47. *Ibid.* h. 422.
48. Miller, "Anarchism, h. 61.
49. Seymour martin Lip-set, "Introduction," dalam *the Encyclopedia of Democracy* (London: Routledge, 1995), h. lv.
50. Miller, "Anarchism, h. 61.
51. *Ibid.*
52. *Ibid.*

Daftar Pustaka

- Anggoro, Kusnanto dan Utomo, Bambang S. "Anarkisme," dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia* – jilid 2, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988.
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 4th edition, Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Johnson, Allan G. *The Blackwell Dictionary of Sociology: A User's Guide to Sociological Language*, Malden: Blackwell Reference, 1997.
- Kumar, Krishan. "Anarchism," dalam *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial* – edisi ke 2 jilid 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
- Lip-set, Seymour martin. "Introduction," dalam *the Encyclopedia of Democracy*, London: Routledge, 1995.
- Miller, David. "Anarchism," dalam *The Encyclopedia of Democracy*, edited by Seymour Martin Lip-set, London: Routledge, 1995.
- Smith, Alan H. (ed.), "Anarchism," dalam *The Encyclopedia Americana*, Danbury: Grolier Incorporated International Headquarters, 1829.
- Taylor, R. Bruce. "Anarchy, Anarchism," dalam *Encyclopedia of Religion and Ethics* – Vol. 1, Edinburgh: T & T Clark, 1971.

Kusmana, adalah Dosen tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004